

BAB 2

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian dimana dasar atau acuan dapat berupa teori - teori atau temuan - temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya, hal ini sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Menurut peneliti salah satu data pendukung yang harus atau perlu dijadikan sebagai bagian tersendiri adalah penelitian yang bersangkutan atau terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih fokus terhadap pokok permasalahan yang terkait dengan persepsi wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa hasil dari penelitian jurnal – jurnal yang didapat melalui laman internet.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini ada tiga penelitian terdahulu yang akan dipaparkan berkaitan dengan persepsi wajib pajak. Persamaan penelitian sebelumnya dengan topik penulis yaitu membahas persepsi wajib pajak terhadap penerapan e-filing. Sedangkan untuk perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu pada lokasi penelitiannya. Untuk lebih jelas terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
Mellinda Octariani (2015)	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Hubungan Penerapan E-filing Dengan Efisiensi Pelaporan SPT Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman	<p>a. Hasil perhitungan rumusan masalah pertama dengan menggunakan skala sikap menunjukkan bahwa frekuensi skor 28-35 dengan presentase 75%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka penerapan e-filing termasuk dalam kategori sikap sangat optimal.</p> <p>b. Hasil perhitungan data yang terhimpung menyatakan bahwa penerapan e-filing menurut persepsi wajib pajak di KPP pratama Sleman termasuk dalam kategori sangat optimal, yang berarti KPP Pratama Sleman telah melakukan upaya dengan sangat baik agar wajib pajak dapat memahami dan menggunakan e-filing dengan baik.</p>
Dwi Aprilia Kartini, Suhadak, dan Devi Farah Azizah (2015)	Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP yang terdaftar	<p>a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa X2 (Perilaku Wajib Pajak) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak</p>

	pada KPP Pratama Batu Periode 2015)	<p>Orang Pribadi) menunjukkan thitung =3,324. Sedangkan tabel ($\alpha = 0.05$) adalah sebesar 1,985. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,324 > 1,985$ atau nilai $sig\ t\ (0,000) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X2 (Perilaku Wajib Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah signifikan pada alpha 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan. akan lebih patuh dan jujur dalam melaporkan SPT dengan menerapkan sistem e-filing dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>b. Untuk mengetahui pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas (Persepsi(X1) dan Perilaku Wajib Pajak (X2)) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan dengan pengujian thitung. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa kedua variabel</p>
--	-------------------------------------	--

		yaitu Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Elisabeth Deny Noviana, Agus Suprijanto, SE, M. M, dan Abrar Oemar, SE, M. Si	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Semarang	<p>Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil pengujian Hipotesis pertama (H1) menyatakan persepsi kebermanfaatan mempunyai nilai signifikansi 0,583 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, maka Persepsi kebermanfaatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penerapan e-Filling. Hasil pengujian Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa persepsi kemudahan mempunyai nilai signifikansi 0,923 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, maka Persepsi kemudahan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penerapan e-Filling. Hasil pengujian Hipotesis ketiga (H3) menyatakan

		<p>bahwa persepsi kepuasan pengguna mempunyai nilai signifikansi 0,828 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 maka Kepuasan pengguna berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penerapan <i>e-Filling</i>.</p> <p>d. Hasil pengujian Hipotesa keempat (H4) menyatakan bahwa persepsi sikap terhadap perilaku mempunyai nilai signifikansi 0,208 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, maka Sikap terhadap perilaku berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penerapan <i>e-Filling</i>.</p> <p>e. Hasil pengujian Hipotesa kelima (H5) menyatakan bahwa persepsi pengalaman mempunyai nilai signifikansi 0,408 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, maka Persepsi pengalaman berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penerapan <i>e-Filling</i>.</p>
--	--	---

		<p>f. Hasil pengujian Hipotesa keenam (H₆) mempunyai nilai signifikansi 0,002 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka Persepsi kecepatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penerapan e-Filing.</p>
--	--	--

Berdasarkan uraian tiga penelitian terdahulu diatas dapat diketahui perbedaan dan persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis yaitu pada penelitian terdahulu wajib pajaknya adalah orang pribadi dimana dapat berprofesi apa saja atau profesinya bebas. Persamaan dari tiga penelitian terdahulu dengan topik penulis yaitu membahas mengenai persepsi wajib pajak terhadap penerepan e-filing untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran atau pungutan yang wajib atau harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan maupun keperluan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak yaitu keikutsertaan atau pemberian wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (wajib pajak) maupun badan yang

sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan “Iuran atau pemberian kepada negara (yang dipaksakan) yang wajib dibayar oleh yang bersangkutan (wajib pajak) sesuai dengan peraturan Undang-undang, dengan tidak mendapat balasan imbalan kembali secara langsung, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Maka apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai akan diberikan tindakan hukum oleh pemerintah atau dengan kata lain wajib pajak tersebut akan dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat teguran atau surat paksa”.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan pengertian pajak yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan ataupun pemasukan negara yang digunakan untuk menyejahterakan dan untuk kemakmuran rakyat. Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4):

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana, pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukannya. Dimana sumber pemasukan keuangan negara didapat

dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak yang kemudian diberikan ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan atau pemasukan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak dapat digunakan sebagai alat atau media untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam fungsi mengatur pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Dan pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Jeni Susyanti&Ahmad Dahlan:2016) sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak yaitu antara lain aparat pajak (fiskus), Wajib Pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (fiskus).

b. Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem yang digunakan dalam memungut pajak pusat atau pajak negara, makna dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M). Sistem ini terdapat dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat.

c. Withholding System

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiskus) melibatkan Wajib Pajak yang lain. Sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan.

4. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak sendiri dapat meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak tersebut merupakan orang pribadi atau dapat juga badan.

Mengacu pada peraturan perpajakan, pengertian wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat atau terkait dalam aktivitas perpajakan termasuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak.

5. Pengertian persepsi

Persepsi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai tanggapan atau penerimaan langsung terhadap sesuatu ataupun proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Persepsi sifatnya sangat khusus dan mengutamakan kondisi karena bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu. Persepsi juga dapat ditentukan oleh faktor personal (sikap, motivasi, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan) dan faktor situasional (waktu, keadaan sosial dan tempat kerja).

Persepsi yang dilihat dari bahasa Latin perceptio atau percipio merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan (menurut Wikipedia).

Jadi persepsi adalah penerimaan informasi yang kemudian ditanggapi atau di proses untuk menjadi sebuah informasi yang kemudian dapat dipahami oleh seseorang.

6. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi dari Surat Pemberitahuan, langkah atau cara pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan bahwa:

“Surat Pemberitahuan Tahunan yang biasanya disebut dengan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan menyampaikan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang meliputi objek pajak ataupun bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Surat pemberitahuan (SPT) menurut mardiasmo (2018) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan dan melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu sebagai sarana untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak/bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut.

Dari pengertian atau definisi diatas maka, Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan serta menyampaikan perhitungan pajak, penghasilan, objek pajak, harta dan juga kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT adalah merupakan sarana yang dipergunakan oleh wajib pajak maupun digunakan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban. SPT memuat beberapa informasi mengenai jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan atau dicantumkan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab

atas segala informasi yang telah tercantum dalam SPT, Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban atas kesalahan informasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Terdapat dua kategori dari Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang penyampaianannya dalam satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, ataupun bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak yang berlaku. Berbeda dengan SPT Tahunan, SPT Masa digunakan untuk menyampaikan pajak dalam kurun waktu atau periode tertentu atau bisa disebut bulanan.

Untuk kepentingan mempermudah dalam pengisian serta pengadministrasian perpajakan, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan langkah-langkah yang digunakan untuk menyampaikan pelaporan SPT diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dimana SPT Tahunan orang pribadi terdiri dari induk SPT dan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Secara umum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak kurang lebih memuat mengenai jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak (PKP), jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan ataupun kelebihan pajak, harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dimiliki bagi Wajib Pajak orang pribadi. Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang dibutuhkan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya harus memuat tentang beberapa jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak (Rahmat Hidayat Lubis, 2018).

7. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) :

- 1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai :
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
 - b) Penghasilan yang meliputi objek pajak dan/atau bukan objek pajak
 - c) Harta dan kewajiban, dan/atau
 - d) Pelunasan dari pemotong atau pemungut mengenai pemotongan dan juga pemungutan pajak orang pribadi atau

badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan sehubungan dengan Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri bagi Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

8. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT pada pasal 3 ayat 3 UU KUP diatur sebagai berikut:

- a. SPT Masa, paling lama sekitar 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan untuk PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama sekitar 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

9. Definisi Pelaporan Menggunakan Sistem E-Filing

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik (e-filing) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS bahwa E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan realtime melalui website Direktorat Jenderal (<http://www.pajak.go.id>).

Dalam Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) e-Filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau Application Service Provider (ASP). Online berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja atau bisa dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan real time berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data dari surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan jelas, lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian e-filing merupakan sebuah layanan pengiriman atau penyampaian, pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet

melalui media ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi untuk melakukan pencetakan semua formulir laporan serta tidak perlu lagi antri dalam melaporkan SPT nya.

E-filing diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER – 1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui e-filing menggunakan website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Formulir 1770S (sederhana) merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari Rp60 juta dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja. Sedangkan untuk formulir 1770SS (sangat sederhana) merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp 60 juta per tahun dari satu ataupun lebih pemberi kerja Penghasilan lain.

1) Elemen yang berkaitan dengan e-filing :

a. Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Merupakan nomor identitas yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing dan diterbitkan oleh kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan pelaporan melalui e-filing. E-FIN ini juga digunakan untuk

mengganti password wajib pajak yang lupa dan mengganti alamat email yang tidak diingat oleh wajib pajak. E-FIN berupa kode kombinasi angka dan huruf sebanyak 10 digit. Permohonan untuk memperoleh e-FIN (Electronic Filing Identification Number) dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan menggunakan formulir permohonan memperoleh e-FIN, dengan melampirkan:

- a) Fotocopy identitas di Wajib Pajak
- b) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
- c) Dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak dan menyampaikan surat kuasa bermaterai serta fotocopy identitas diri kuasa.

Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan e-FIN (Electronic Filing Identification Number) paling lama 1(satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.

b. Notifikasi

Merupakan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status e-SPT yang telah disampaikan melalui website Direktorat Jenderal Pajak e-filing.

c. E-mail

E-mail (Electronic Mail) adalah surat dalam bentuk elektronik, E-mail merupakan salah satu bentuk fasilitas atau layanan internet yang digunakan untuk proses pelaporan secara e-filing dimana e-mail tersebut berguna untuk menerima beberapa notifikasi dari e-filing seperti konfirmasi saat registrasi, konfirmasi ubah password, dan menerima kode verifikasi.

d. Kode verifikasi

Kode verifikasi adalah sekumpulan angka dan/atau huruf yang digenerate oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Kode verifikasi akan digunakan pada waktu proses e-filing sudah selesai dan tinggal mengirimnya. Kode verifikasi tersebut akan dikirim ke email yang telah didaftarkan pada waktu registrasi.

e. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Merupakan nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

f. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

BPE adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan dalam hal e-filing yang dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Bukti penerimaan ini akan dikirimkan ke email wajib pajak yang telah didaftarkan waktu registrasi.

2) Syarat Menggunakan e-Filing

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 untuk dapat menggunakan fasilitas e-Filing Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b. Kartu identitas diri
- c. Nomor telepon yang aktif agar dapat menerima SMS
- d. Alamat email
- e. Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT
- f. Memiliki PC yang memadai dan terkoneksi ke Internet

Adapun syarat-syarat WP (wajib pajak) dapat menikmati layanan e-Filing atau pengiriman data / penyampaian SPT secara elektronik yaitu memiliki E-FIN yang diperoleh dari KPP. E-filing bisa digunakan bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT tahunan PPh orang pribadi (1770S, 1770SS) maupun

SPT tahunan PPh badan (1771). Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S telah disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi e-filing. Sementara untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, e-filing di DJP Online juga menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun e-Form.

10. Pelaporan SPT menggunakan manual (menggunakan kertas)

Pelaporan menggunakan manual yaitu pelaporan SPT tahunan dengan menggunakan kertas atau formulir. Untuk penggunaan manual sendiri dapat datang langsung dan dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia.

Setiap wajib pajak wajib mengisi formulir SPT Tahunan tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengisian formulir menggunakan manual (menggunakan kertas) antara lain meliputi data penghasilan, daftar harta, maupun hutang, serta daftar keluarga yang menjadi tanggungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Bagi wajib pajak yang menggunakan laporan keuangan maka wajib untuk mencatumkan atau melampirkan laporan laba rugi dan neraca.

Formulir yang telah diisi dengan lengkap wajib ditandatangani oleh wajib pajak. Tahap selanjutnya yaitu langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian. Setelah itu menyerahkan berkas kepada petugas pajak di loket untuk diproses. Proses pelaporan SPT Tahunan menggunakan manual akan selesai apabila wajib pajak sudah

menerima bukti atau tanda pelaporan SPT Tahunan yang telah ditandatangani oleh petugas.

Untuk proses secara manual kebanyakan masih dikeluhkan oleh masyarakat karena padatnya antrian yang panjang. Penggunaan manual sendiri akan lebih memakan waktu serta biaya dan kurang efisien. Maka dengan itu, Ditjen Pajak menyediakan pelaporan secara online melalui e-filing. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penerapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat disebut atau dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan Adapun maksud dari ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama tiga tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dilakukan secara tepat waktu.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai

dengan November tidak lebih dari tiga tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dengan tahun terakhir sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai dengan November telah disampaikan.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tahun terakhir.